



**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Kliping Digital Media Online

Ekonomi

Rabu, 24 November 2021



**BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan & Kearsipan
Jakarta
2021**

Daftar Isi

1. KEMELUT TENAGA KERJA INFORMAL - *Media Online Kompas*
2. PETA JALAN INDUSTRI DIREVISI - *Media Online Kompas*
3. BASIS EKSPOR BERGESER KE MANUFAKTUR - *Media Online Investor Daily*
4. 020 DAN MASA DEPAN UMKM - *Media Online Bisnis Indonesia*
5. PEMULIHAN EKONOMI TIDAK BOLEH HAMBAT PENCAMPAIAN SDGs - *Media Online Media Indonesia*

Kemelut Tenaga Kerja Informal

Tasmilah

Statistisi pada BPS Kota Malang

Pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan, tetapi menyisakan permasalahan ketenagakerjaan. Perekonomian yang mulai pulih telah mampu menyerap tenaga kerja kembali, tetapi belum sama seperti masa prapandemi. Selain meningkatkan jumlah penganggur menjadi 9,1 juta, pandemi juga meningkatkan jumlah pekerja informal dari 71,96 juta menjadi 77,91 juta (Agustus 2021).

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), informalitas mengancam hak-hak pekerja dan berdampak negatif pada kesinambungan usaha karena faktor rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses modal. Tenaga kerja informal tak berdaya menghadapi konsekuensi dari dampak pandemi. Kegagalan dalam mendukung tenaga kerja atau sektor informal akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja informal.

Menurut penelitian Moeis (2020) dan Dartanto (2020), untuk meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas ekonomi diperlukan mobilitas tenaga kerja informal ke formal.

Dalam 20 tahun terakhir, persentase tenaga kerja informal di Indonesia mengalami penurunan seiring pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai dengan perspektif modernisme, di mana tenaga kerja informal akan kian berkurang seiring modernisasi perekonomian.

Informalitas timbul karena ketakmampuan perekonomian menciptakan lapangan kerja formal meski harus diakui bahwa pekerjaan informal ini jadi jaring pengaman di tengah krisis guna menghindari pengangguran yang panjang dan kemiskinan yang kian parah.

Kontraksi ekonomi 2020 menyebabkan kehilangan pekerjaan formal dan pilihan jadi tenaga kerja informal jauh lebih baik daripada jadi penganggur. Ini ditandai peningkatan tenaga kerja informal yang mencapai 5,72 juta dan peng-

anggur meningkat 2,67 juta.

Klasifikasi tenaga kerja formal dan informal berdasarkan publikasi BPS merujuk pada status pekerjaan utama. Tenaga kerja formal meliputi tenaga kerja yang berstatus sebagai karyawan/pegawai/buruh dan berusaha dibantu buruh tetap. Adapun tenaga kerja informal berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga.

Peningkatan tenaga kerja informal paling banyak terjadi pada pekerja keluarga dengan penambahan 3,56 juta orang.

Meningkatkan kesenjangan

Tingginya tenaga kerja informal juga terjadi di banyak negara berkembang lain. Dalam laporan ILO 2021, hilangnya pekerjaan secara besar-besaran telah berdampak buruk pada ketimpangan global di mana perempuan, kaum muda, dan pekerja di sektor informal menjadi pihak paling terpukul.

Sekitar 108 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan atau kemiskinan ekstrem sejak 2019. ILO juga memproyeksikan sedikitnya 220 juta orang akan menganggur pada 2021 dan hanya akan ada sedikit perbaikan di 2022. Proyeksi pertumbuhan lapangan kerja tak akan cukup untuk menutup kesenjangan yang terbuka akibat krisis.

Struktur dan pemulihan ekonomi yang tak merata antarprovinsi berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Memacu pertumbuhan ekonomi akan mengurangi tenaga kerja informal yang tak merata antarwilayah. Secara nasional, proporsi tenaga kerja informal 59,45 persen. Provinsi dengan tenaga kerja informal lebih dari 70 persen ialah Lampung, Bengkulu, NTB, NTT, Sulawesi Barat, dan Papua. Sementara yang kurang dari 40 persen ialah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau.

Pandemi kian menyingkap kesenjangan antarpekerja di Indonesia. Pekerja dengan pendidikan tinggi lebih mampu bertahan sebagai tenaga kerja

formal dibandingkan pekerja dengan pendidikan rendah yang berpeluang lebih besar mengalami transisi menjadi tenaga kerja informal.

Berdasarkan studi empiris penulis, tingkat pendidikan, pelatihan, keterampilan, penggunaan teknologi digital dan internet akan menurunkan peluang seorang tenaga kerja mengalami transisi menjadi informal ataupun penganggur di tengah guncangan ekonomi saat pandemi.

Mendorong transisi tenaga kerja informal menjadi formal merupakan salah satu rekomendasi ILO terhadap banyak negara di dunia. Hal ini karena informalitas akan membahayakan hak-hak pekerja dan tenaga kerja informal juga tak tersentuh upah minimum.

Meningkatkan partisipasi sekolah, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong penggunaan teknologi digital/internet untuk tujuan pemasaran ataupun penjualan akan meningkatkan peluang seorang pekerja mengalami transisi yang lebih tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan adalah dengan program kartu pekerja yang masih berlanjut hingga sekarang. Pada kenyataannya, peserta program ini didominasi penduduk yang sudah bekerja dan juga diakui manfaatnya dalam meningkatkan keterampilan.

Namun, apakah peningkatan keterampilan ini berdampak pada pencapaian pekerjaan yang layak? Perlu penelitian lebih mendalam untuk menjawabnya. Yang bisa dilakukan saat ini adalah membentuk wadah yang memfasilitasi alumni pelatihan ini untuk berbagi informasi dan pengalaman sehingga mempercepat transisi pekerjaan ataupun kesejahteraan pekerja. Penempatan bagi peserta pelatihan kartu pekerja juga diperlukan agar dampak dari program ini lebih terukur dan menjadi solusi atas masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Peta Jalan Industri Direvisi

Pemerintah merevisi peta jalan industri kendaraan listrik. Peta baru diharapkan dapat menarik investor sekaligus mengembangkan ekosistem yang terintegrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Peta jalan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB nasional yang berlaku saat ini dinilai perlu disesuaikan agar lebih menarik bagi investor. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri.

Peraturan hasil revisi ini sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Sony Sulaksono, revisi itu bertujuan menarik investor, memudahkan industri otomotif dalam bertransisi, dan mengembangkan ekosistem industri KBLBB.

Peraturan baru akan merevisi sejumlah kerangka terkait target waktu importasi, target produksi, serta tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). "Kementerian Perindustrian juga merencanakan target-target berdasarkan prediksi kemampuan industri dalam negeri," kata Sony, Selasa (23/11/2021).

Salah satu poin penting dalam revisi peta jalan itu adalah penyesuaian tata cara perhitungan TKDN. Menurut Sony, akan ada perubahan pembobotan TKDN pada komponen utama, komponen pendukung, dan perakitan kendaraan listrik. Peta jalan yang saat ini berlaku masih mengacu pada target perhitungan TKDN sebelum pandemi yang dinilai membe-

Kebutuhan Investasi untuk Membangun Pabrik Baterai

Perkiraan investasi tahap awal untuk membangun pabrik baterai dengan kapasitas 140 Gwh

IBC [MIND ID, PLN, PERTAMINA, anram] + Mitra usaha

		Kapasitas/tahun	Total Belanja modal (juta dollar AS)
Sel baterai	Sel	140 Gwh	6.730
Bahan kimia baterai	Katoda	270 kt	3.825
	Prakursor	270 kt	1.800
Peleburan/pemurnian	NiSO ₄ (RKEF)	100 kt Ni	1.380
	NiSO ₄ (HPAL)	50 kt Ni	1.300
Penambangan	Limonit dan Saprolit	16 Mt	160
Infra	ESS	1,2 Gwh	40
Daur ulang	Mendaur ulang	10 kt	30

Total 15,3 miliar dollar AS

Keterangan: IBC merupakan konsorsium perusahaan milik negara bidang pertambangan dan negeri yang terdiri dari MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

Sumber: Indonesia Battery Corporation (IBC)

ekosistem kendaraan listrik dari hulu-hilir.

Dengan memenuhi komponen secara lokal, biaya produksi bisa dikurangi. "Kalau rantai pasok lokal dan ekosistemnya sudah kuat, akan lebih mudah menghadirkan mobil listrik dengan terjangkau," katanya.

Saat ini, kendaraan listrik di Indonesia umumnya dijual dengan harga Rp 600 juta-Rp 800 juta. Sementara daya beli mayoritas masyarakat Indonesia Rp 250 juta-Rp 300 juta.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menilai harga mobil listrik dengan spesifikasi yang setara kendaraan hemat bahan bakar dan harga terjangkau (LCGC) saat ini masih mahal. Namun, seiring perkembangan teknologi, terutama perkembangan baterai yang harganya sepertiga dari keseluruhan mobil, harga mobil listrik akan semakin murah.

"Produsen otomotif China sudah memproduksi mobil listrik di kisaran harga Rp 60 juta. Saya kira program LCGC ke depan akan lebih tepat untuk mobil listrik. Terlebih Indonesia sudah mampu memproduksi baterai mobil di dalam negeri," ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan, ada dua teknologi kunci yang harus dikuasai dalam pengembangan kendaraan listrik, yakni baterai dan motor listrik. Oleh karena itu, guna mendukung percepatan program kendaraan listrik, para peneliti BRIN fokus pada pengembangan baterai dan material yang sumbernya di dalam negeri. "Indonesia memiliki pasokan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Ini peluang yang bisa dimanfaatkan agar dapat berkompetisi di pasar global," ujarnya.

(AGE/NIK/MTR/MKN)

ratkan pelaku industri. Penyesuaian dilakukan untuk mempermudah pelaku industri mengakses bahan baku dan komponen karena Indonesia belum memiliki ekosistem kendaraan listrik yang kuat.

Pemenuhan TKDN akan didorong lewat pengembangan industri baterai listrik di dalam negeri. Saat ini, Indonesia sudah memiliki pabrik baterai listrik oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) yang dibangun tahun ini dan memulai produksi pada 2024.

Pemerintah juga menerima komitmen investasi untuk membangun pengolahan bahan baku baterai. Beberapa di antaranya PT QMB New Energy Minerals yang berinvestasi 700 juta dollar AS di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Halmahera Persada Legend yang berinvestasi Rp 14,8 triliun di Halma-

hera, Maluku Utara; dan investasi 5 miliar dollar AS di Kawasan Industri Weda Bay, Maluku Utara.

Pemerintah juga merelaksasi kerangka target waktu importasi kendaraan *completely knocked down* (CKD) dan *incompletely knocked down* (IKD). CKD adalah kendaraan yang diimpor dalam keadaan lengkap dengan komponen, tetapi belum dirakit. Sementara IKD diimpor dalam kondisi tidak lengkap dan tidak utuh karena beberapa komponennya sudah bisa dipenuhi sendiri dan dirakit di dalam negeri.

Awalnya, mengacu pada peta jalan yang lama, impor kendaraan CKD roda empat dan beroda dua ditargetkan hanya sampai 2022, sementara mulai 2023-2030 impor hanya diizinkan untuk kendaraan IKD dan komponen. Namun, berdasar-

kan peta baru, kendaraan CKD roda empat boleh diimpor sampai 2024, impor kendaraan IKD beroda empat sampai 2026, dan setelah itu industri hanya boleh mengimpor komponen *part by part*. Target untuk kendaraan roda dua lebih ketat, yakni hanya sampai 2021 untuk impor CKD, karena komponennya sudah bisa dipenuhi di dalam negeri. Mulai 2022, produsen kendaraan listrik roda dua hanya boleh mengimpor komponen.

Harga terjangkau

Pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik berbasis baterai penting untuk menyediakan kendaraan listrik dengan harga terjangkau. Vice President Wuling Motors Han Dehong mengatakan, pasar mobil listrik murah memungkinkan untuk digarap asalkan pemerintah mengembangkan

▶ klik.kompas.id/ekonomi



Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan memindai QR Code.

Basis Ekspor Bergeser ke Produk Manufaktur

Oleh Leonard AL Cahyoputra, Arnoldus Kristianus, Ridho Syukra, dan Eva Fitriani

JAKARTA – Basis ekspor Indonesia telah bergeser dari komoditas primer ke produk manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Pergeseran ini terjadi karena dipicu oleh kebijakan transformasi ekonomi dan hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi.

Salah satu program prioritas Presiden Jokowi adalah transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam (SDA) menjadi industri bernilai tambah. Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan mentah, tetapi produk jadi atau barang setengah jadi. Presiden Jokowi juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia dengan program hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau (*green energy*) atau ekonomi sirkular.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Karasuma mengatakan, di tengah himpitan pandemi Covid-19, kontribusi ekspor sektor industri manufaktur pada tahun 2020 justru menjadi sebesar US\$ 131,1 miliar. Nilai ekspor manufaktur ini merupakan 80,28 ekspor nasional tahun 2020. Sementara pada Januari-Oktober 2021 tercatat sebesar 77,19% atau senilai US\$ 143,76 miliar dari total ekspor nasional US\$ 186,31 miliar.

"Peningkatan kinerja industri ini tidak lepas dari upaya kita untuk melakukan pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia," kata Menteri saat memberikan *keynote speech* dalam acara *Berbasis Economic Outlook 2022* dengan tema "Akselerasi Pembangunan Industri 2022" yang digelar Berbasis Media Holdings (BSMH), Selasa (23/11/2021).

Dengan pencapaian tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemperin) optimis kinerja industri pada akhir tahun 2021 akan mendekati atau mencapai target pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 4%, kontribusi industri pengolahan nonmigas sebesar 18%, dan kontribusi ekspor produk industri sebesar 70%.

Sejalan dengan itu, Kemperin juga optimis bahwa proyek pertumbuhan sektor manufaktur pada tahun 2022 akan naik secara signifikan, sebesar 5-5,5%, katanya. Menteri pun menyebutkan industri manufaktur masih memberi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 17,34% pada kuartal III-2021.

Dia menjelaskan, dalam upaya menjaga dan meningkatkan kontribusi ekspor manu-

faktur, berbagai kebijakan dan insentif telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan subsidi impor 35% pada tahun 2022 yang digulirkan oleh Kemperin dengan prioritas pada industri-industri dengan nilai impor yang besar pada 2019. Di dunia ekonomi, lanjut dia, industri orientasi ekspor dan substitusi impor sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi keduanya memiliki korelasi positif yang kuat. Untuk bisa berorientasi pada ekspor, lanjut Agus, industri harus tumbuh dengan baik dan berkembang dalam lingkungan ekonomi yang sehat. Lingkungan sehat bagi industri untuk tumbuh tidak dapat tercipta di tengah gempuran impor yang tak terkendali.

"Kebijakan subsidi impor merupakan salah satu instrumen pengendalian impor sehingga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh berkembang dan meningkatkan daya saing sampai mereka mampu dan mampu bersaing di persaingan global," kata Menteri.

Di menyoroti, subsidi impor juga mendorong penciptaan unititas industri domestik, peningkatan investasi, dan utamanya akselerasi program hilirisasi. Dalam struktur impor dalam negeri, nilai impor produk-produk hulu sangat besar. "Kebijakan subsidi impor secara perlahan menggerakkan kegiatan tersebut dan membuka ruang bagi adanya hilirisasi yang menghasilkan produk-produk hulu substitusi impor," kata Agus.

Dia menjelaskan, kemampuan industri untuk meningkatkan kapasitas dan nilai ekspor juga terus dilakuk oleh tatanan kebijakan dan fasilitas, baik fisik dan non-fisik. Kemperin dan Kementerian/Lembaga lain telah memberikan fasilitas kemudahan iklim berusaha, terutama antipansi penciptaan faktor-faktor produksi utama yaitu bahan baku, modal, dan tenaga kerja, sehingga tidak lagi ada alasan program hilirisasi tidak berjalan.

► Bersambung ke hal 2



Kinerja Makro Sektor Industri Tahun 2021



Proyeksi Industri Pengolahan Nonmigas

Indikator	2019	2020	2021P
Pertumbuhan Industri Nonmigas	1,3%	2,5%	4,0%
Kontribusi Ekspor Produk Industri	76,3%	80,3%	75,9%
Kontribusi Industri Nonmigas terhadap PDB	15,7%	15,6%	16,0%

Sumber: *) Proyeksi Kementerian Perindustrian



Sambungan dari hal 1

factura beberapa tahun terakhir ini dan seiring dengan berbagai anjuran Presiden untuk memperbaiki kinerja sektor manufaktur nasional, Kemperin mendorong kegiatan hilirisasi industri yang memberikan dampak yang luas bagi pembangunan nasional termasuk peningkatan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Menyebutkan, pemerintah ini juga dilindungi oleh lembaga strategi yang terbentuk dalam struktur manufaktur dan membangun ekonomi berbasis inovasi. Salah satunya adalah skema insentif 45% untuk kegiatan ekspor industri sektor hulu, sehingga skema insentif akan lebih efektif dan lebih besar pada ekspor, yang akan meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan *diversa ekspor*.

Target Realisasi Investasi 2021 - 2022

Target Realisasi Investasi 2021	Target Realisasi Investasi 2022
Rp 88,7 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 98,8 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022
Rp 90,0 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 1,100 - 1,200 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022

Peluang dan Tantangan Industri 2022

Peluang
• Implementasi UU Cipta Kerja pada tahun untuk meningkatkan investasi industri hulu di tahun 2022.
• Perumbuhan ekonomi pada 2022 akan lebih baik dari 2021, dimana pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,5%.

Tantangan
• Kondisi ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.

Target Investasi 2022
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri) menetapkan target investasi tahun 2022 dapat mencapai Rp 120 triliun. Target tersebut dipandang sebagai salah satu upaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022.

Kesimpulan
• Kinerja makro sektor industri tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama di sektor manufaktur. Hal ini didukung oleh kebijakan transformasi ekonomi dan hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi.

Target Realisasi Investasi 2021 - 2022

Target Realisasi Investasi 2021	Target Realisasi Investasi 2022
Rp 88,7 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 98,8 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022
Rp 90,0 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 1,100 - 1,200 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022

Peluang dan Tantangan Industri 2022

Peluang
• Implementasi UU Cipta Kerja pada tahun untuk meningkatkan investasi industri hulu di tahun 2022.
• Perumbuhan ekonomi pada 2022 akan lebih baik dari 2021, dimana pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,5%.

Tantangan
• Kondisi ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.

Target Investasi 2022
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri) menetapkan target investasi tahun 2022 dapat mencapai Rp 120 triliun. Target tersebut dipandang sebagai salah satu upaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022.

Kesimpulan
• Kinerja makro sektor industri tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama di sektor manufaktur. Hal ini didukung oleh kebijakan transformasi ekonomi dan hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi.

Target Realisasi Investasi 2021 - 2022

Target Realisasi Investasi 2021	Target Realisasi Investasi 2022
Rp 88,7 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 98,8 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022
Rp 90,0 T (Rp 40,2 - 120,2) 2021	Rp 1,100 - 1,200 T (Rp 40,2 - 120,2) 2022

Peluang dan Tantangan Industri 2022

Peluang
• Implementasi UU Cipta Kerja pada tahun untuk meningkatkan investasi industri hulu di tahun 2022.
• Perumbuhan ekonomi pada 2022 akan lebih baik dari 2021, dimana pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,5%.

Tantangan
• Kondisi ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.
• Dampak ketidakpastian ekonomi global yang sedang melambat karena dampak pandemi Covid-19.

Target Investasi 2022
• Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri) menetapkan target investasi tahun 2022 dapat mencapai Rp 120 triliun. Target tersebut dipandang sebagai salah satu upaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022.

Kesimpulan
• Kinerja makro sektor industri tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif, terutama di sektor manufaktur. Hal ini didukung oleh kebijakan transformasi ekonomi dan hilirisasi yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi.

O2O dan Masa Depan UMKM

Transformasi digital meruntuhkan *barrier to entry* bagi konsumen dan produsen. Konsumen di manapun dapat bertemu dengan produsen (penjual) yang berlokasi di manapun. Hal tersebut yang membuat *e-commerce* berkembang pesat. Total penjualan melalui *e-commerce* secara global meningkat dari US\$3 triliun menjadi melebihi US\$4 triliun dalam waktu dua tahun (emarketer, 2021).

Untuk konteks Indonesia, rata-rata konsumsi per bulan dari konsumen di platform Tokopedia meningkat 71% dibandingkan dengan masa sebelum pandemi (LPEM UI, 2021). Awalnya, *disrupsi* digital menghantam ritel tradisional tetapi kemunculan layanan *online to offline* (O2O) dapat menjadi jalan tengah.

Kelemahan ritel tradisional adalah sekat wilayah, di mana konsumen potensial mereka hanya berada pada wilayah sekitar tokonya saja. Dari sisi konsumen, biaya pencarian juga tinggi, karena mereka harus mencari dari ritel ke ritel untuk mendapatkan satu barang akibat tidak adanya informasi yang cukup mengenai ketersediaan barang. Kondisi tersebut membuat konsumen beralih dari *offline* ke *online*. Hal ini yang coba dijawab melalui layanan O2O.

O2O adalah strategi untuk membawa konsumen *online* untuk berbelanja pada toko fisik. Setidaknya terdapat tiga strategi untuk hal tersebut. *Pertama*, membuat proses pengambilan barang yang dibeli secara *online* dilakukan langsung (*offline*). *Kedua*, membantu proses transaksi (pembayaran) ketika berada di dalam toko *offline*. *Ketiga*, membantu konsumen untuk mengembalikan barang secara lang-

sung ke toko apabila terjadi permasalahan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Kehadiran layanan O2O diharapkan mampu mendorong kinerja UMKM ritel tradisional pada masa pandemi.

Pandemi mendorong transformasi dunia usaha, tidak hanya usaha skala besar tetapi juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Survei longitudinal yang dilakukan Prospera (2021) menunjukkan bahwa 1 dari 10 usaha tidak lagi beroperasi akibat pandemi, di mana 53% di antaranya menyebutkan ketiadaan permintaan menjadi alasan utama. Selain itu, biaya produksi juga menjadi ancaman serius, di mana 23% perusahaan yang di survei mengaku mengalami kesulitan membayar upah dan 31% kesulitan membayar sewa.

Permintaan dan biaya menjadi dua isu yang muncul dalam survei Prospera di atas. Adanya pembatasan mobilitas dan turunnya daya beli masyarakat, tentu menurunkan permintaan secara agregat. Kehadiran teknologi digital membuka akses antara pelaku usaha dan konsumen. Diperkirakan 32% dari pelaku usaha Indonesia menggunakan platform digital untuk mendorong penjualan selama pandemi berlangsung.

Pelaku usaha yang melakukan digitalisasi mendapatkan penghasilan 8% lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak (Prospera, 2021). Hal serupa terjadi pada UMKM. Diperkirakan terdapat 25% usaha mikro dan 42% usaha menengah yang menggunakan platform digital untuk penjualan, dan berhasil mendorong pendapatan mereka. Pendapat usaha skala menengah yang menggunakan platform digital lebih besar 18% dibandingkan dengan yang tidak menggunakan.

Kehadiran layanan O2O dapat mendorong UMKM saat

ini dapat berubah menikmati keunggulan dari ekonomi digital meskipun tokonya tetap fisik (*offline*), tetapi berbagai transaksi maupun pembukuan perusahaan dapat dilakukan secara *online*. Setidaknya, terdapat sejumlah dampak dari kehadiran layanan O2O terhadap UMKM secara umum.

Pertama, membuka akses pasar dengan menurunkan biaya pencarian. Layanan O2O membuat konsumen lebih mudah mendapatkan informasi mengenai barang dan mendapatkannya. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk bertransaksi langsung di UMKM secara *offline*. Selain itu, dengan terbuka akses informasi, cakupan pasar dari UMKM *offline* akan menjadi lebih besar.

Kedua, menurunkan biaya transaksi. Adanya layanan tekfin seperti sistem pembayaran pada toko *offline* memudahkan proses transaksi, baik bagi konsumen maupun pedagang. Layanan pembayaran digital membuat toko *offline* mampu mengintegrasikan layanan/produknya dengan berbagai layanan *online*, seperti *online delivery* yang dapat meningkatkan pendapatan dari toko *offline*.

Adanya digitalisasi membuat UMKM mengadopsi berbagai pembayaran digital dan meraih nilai tambah darinya. UMKM yang mengadopsi layanan digital (melalui GoTo Financial) mengalami kenaikan omzet sebesar 37% atau setara Rp53 triliun (LD-UI, 2021).

Ketiga, integrasi dengan tekfin membantu sistem administrasi dari toko, seperti pencatatan transaksi yang pada akhirnya mempermudah akses toko terhadap lembaga keuangan. Contohnya, layanan *point of sales* seperti Moka dapat mendorong efisiensi melalui pengelolaan tidak hanya transaksi, tetapi juga manajemen karyawan dan barang. Ketika transaksi tercatat rapi secara digital, sebuah toko akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap berbagai layanan perbankan.

Kehadiran layanan O2O dapat menjadi angin segar dalam perkembangan UMKM Indonesia ke depan. Ekosistem yang telah terbentuk dan berbagai inovasi yang berkembang pesat pada berbagai perusahaan yang merintis layanan O2O seperti perusahaan teknologi finansial, dapat didorong menjadi lebih efisien dengan menyederhanakan prosedur, teknologi dan sistem yang ramah konsumen.

Pada saat yang sama, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sehingga keseluruhan sistem tetap dapat dipercaya publik penggunanya.

Hlm: 2 - Kolom: Opini

Rabu, 24 November 2021

Pemulihan Ekonomi tidak Boleh Hambat Pencapaian SDGs

INDONESIA tidak akan menggeser target pencapaian *sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dicanangkan walaupun saat ini masih berjuang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah bahkan tetap bertekad untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian SDGs. "SDGs merupakan komitmen global menjadi semakin penting untuk menjadi panduan, kerangka, serta agenda bersama yang inklusif dan berkelanjutan demi menyelamatkan generasi hari ini dan masa depan," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat membuka Indonesia's Sustainable Development Goals Annual Conference 2021 secara virtual, kemarin.

Wapres pun mencontohkan bagaimana pemerintah berusaha mempercepat pencapaian tujuan pertama SDGs untuk mengentaskan warga dari kemiskinan ekstrem secara global. "Walaupun target yang ditetapkan pada 2030, Bapak Presiden memberikan arahan agar target pengentasan

kemiskinan ekstrem dicapai lebih awal, yaitu dapat dinihilkan pada 2024," ungkapnya.

Berkaitan dengan pencapaian tujuan kedua SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, tambah Ma'ruf, pemerintah saat ini berupaya penurunan angka prevalensi *stunting* menjadi 14% pada 2024.

Pemerintah, lanjutnya, pada prinsipnya terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, *no one left behind*.

Lebih lanjut Ma'ruf mengungkapkan presidensi G-20 Indonesia juga akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis di tingkat global, termasuk dalam pencapaian SDGs.

Pada acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong fokus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mencapai komitmen jangka menengah dan panjang SDGs.

"Fokus APBN bukan hanya bersifat jangka pendek. Indonesia memiliki komitmen jangka menengah panjang, seperti yang selama ini dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)," katanya.

Program SDGs, lanjutnya, juga sesuai dengan harapan dan cita-cita untuk mencapai kondisi 2045, yaitu Indonesia menjadi negara yang masuk ke lima ekonomi terbesar di dunia.

Untuk mencapai indikator SDGs, ujarnya, peranan pendanaan menjadi sangat penting, baik yang berasal dari APBN maupun kombinasi antara APBN dan *private sector* secara *stand alone*, filantropis, dan masyarakat secara bersama atau sendiri-sendiri.

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, berdasarkan *roadmap* Indonesia menuju SDGs, kebutuhan pendanaan untuk SDGs mencapai Rp67 ribu triliun dengan selisih atau gap kebutuhan pendanaan sekitar Rp14 ribu triliun yang masih harus dipenuhi. (Che/Des/X-7)

Pilar Pembangunan SDGs di Indonesia

Pembangunan Sosial

- Tanpa kemiskinan
- Tanpa kelaparan
- Kehidupan sehat dan sejahtera
- Pendidikan berkualitas
- Kesetaraan gender



Pembangunan Ekonomi

- Energi bersih dan terjangkau
- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- Industri, inovasi, dan infrastruktur
- Berkurangnya kesenjangan
- Kemitraan untuk mencapai tujuan



Pembangunan Lingkungan

- Air bersih dan sanitasi layak
- Kota dan permukiman yang berkelanjutan
- Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Penanganan perubahan iklim
- Ekosistem lautan
- Ekosistem daratan



Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

- Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Beberapa Manfaat SDGs

- Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
- Menjaga kualitas lingkungan hidup.

Prevalensi Stunting Balita di Indonesia

